

**SERANG**- Penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Kerja Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2016 belum tuntas seluruhnya. Hingga kemarin, Pemprov Banten masih menyisakan 2 temuan yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

---

Diketahui, berdasarkan LHP BPK atas LKPD Pemprov Banten tahun anggaran 2016 terdapat temuan-temuan seperti kerugian negara senilai Rp 5,755 miliar dan potensi kerugian negara Rp 1,664 miliar atau total Rp7,419 miliar.

Inspektur Provinsi Banten E Kusmayadi mengatakan, secara garis besar progres tindak lanjut temuan dalam LHP BPK tahun anggaran 2016 sudah cukup baik. Kini pihaknya tengah fokus menyelesaikan 2 temuan sisanya yang belum rampung.

“Temuan BPK sedang kita upayakan progresnya dengan SKPD (sekarang disebut OPD), yang jelas nanti kalau sudah pada waktunya saya sampaikan. Yang jelas sedang diupayakan progresnya untuk (temuan) 2016 sudah kurang lebih 75 persen, tinggal 2 temuan yang belum dikembalikan tetapi akan dikembalikan pada pembayaran kewajiban oleh pihak ketiganya,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri acara evaluasi pendamping lanjut usia, di Kantor Dinsos Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (8/11).

Menurutnya, 2 temuan yang belum diselesaikan berada di DPUPR, meski tak merinci nominalnya. “Kurang lebih semua (nilai temuan) Rp 7,4 miliar ya. Angkanya lupa cuma 2 temuan itu kepada pihak ketiga ada di tempat Pak Hadi (Kepala DPUPR Banten Hadi Soryadi), hanya DPUPR saja,” katanya.

Disinggung kabar yang menyebut pihak ketiga yang belum menyelesaikan temuan itu lari dari tanggungjawabnya, Kusmayadi mengaku tetap akan memprosesnya. Temuan akan ditindaklanjuti melalui sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR).

“Itu kan bisa diproses melalui TPTGR. Nanti pada sidang majelis (diterangkan) bahwa yang bersangkutan sudah tidak sanggup untuk menyelesaikan maka kita akan proses di TPTGR,” ungkapnya.

Dengan hal tersebut dia berkeyakinan semua temuan dalam LHP BPK tahun anggaran 2016 bisa terselesaikan. “Yang bersifat administrasi sudah. Temuan lain dalam bentuk uang sudah disetorkan. Insya Allah 2016 akan terselesaikan,” ujarnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, pihaknya akan terus berupaya menuntaskan temuan dalam LHP BPK. Bahkan dia berencana melaporkan pihak ketiga yang kabur dari tanggung jawab ke pihak berwenang.

“Bagus. Itu kan memang kasus sudah dibawa ke pengadilan, kasus 2014 bukan sekarang. (Pihak yang bertanggung jawab) sudah dihukum 1,5 tahun. Kita kan sudah rapat bersama

dengan BPK, apakah yang kabur masih dimasukan temuan BPK? Kemarin itu kan kita lihat apa perlu kita cari, kita panggil,” ujarnya. (dewa)